

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini difokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi APBD dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, serta memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara tersanding. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut : Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran. Kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan analisis Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja. Oleh karena itu untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat dari Tabel Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berikut ini :

Tabel 5.1
Gambaran Data Penelitian Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015			Tahun anggaran 2016			Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		Setelah			Setelah			Setelah		
		Perubahan			Perubahan			Perubahan		
	PENDAPATAN	742.613.807.820,00	721.629.396.753,00	97,17	922.131.818.275,31	837.653.147.107,30	90,84	925.333.207.133,63	912.154.028.640,70	98,58
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.476.950.970,00	44.191.272.752,00	111,94	42.315.217.104,31	43.510.608.957,30	102,82	94.572.873.937,53	95.920.806.099,60	101,43
2	Pendapatan Pajak Daerah	8.360.415.756,00	9.458.874.697,00	113,14	9.980.104.111,00	11.511.702.617,00	115,35	10.431.319.267,00	13.395.658.504,00	128,42
3	Pendapatan Retribusi Daerah	4.366.632.123,00	3.498.898.427,00	80,13	2.946.729.992,00	2.283.737.020,00	77,50	2.503.375.491,60	2.756.808.344,00	110,12
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.203.076.277,00	5.203.076.277,00	100	7.296.507.091,00	7.296.507.091,00	100,00	7.296.507.091,00	6.237.571.907,00	85,49
5	Lain-lain PAD Yang Sah	21.546.826.814,00	26.030.423.351,00	120,81	22.091.875.910,31	22.418.662.229,30	101,48	74.341.672.087,93	73.530.767.344,60	98,91
6	PENDAPATAN TRANSFER	701.886.856.850,00	677.293.650.226,00	96,5	878.566.601.171,00	792.782.821.383,00	90,24	829.655.199.421,10	814.779.722.766,10	98,21
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	614.101.961.000,00	590.819.321.650,00	96,21	748.886.469.000,00	665.556.523.219,00	88,87	668.910.212.000,00	653.264.751.122,00	97,66
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	72.347.983.000,00	72.347.983.000,00	100	110.292.255.000,00	110.292.255.000,00	100,00	140.630.968.000,00	140.630.968.000,00	100,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.521.912.850,00	13.286.345.576,00	91,49	18.289.877.171,00	15.836.043.164,00	86,58	20.114.019.421,10	20.884.003.644,10	103,83
10	Bantuan Keuangan	915.000.000,00	840.000.000,00	91,8	1.098.000.000,00	1.098.000.000,00	100,00			
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.250.000.000,00	144.473.775,00	11,56	1.250.000.000,00	1.359.716.767,00	108,78	1.105.133.775,00	1.453.499.775,00	131,52
12	Pendapatan Hibah	1.250.000.000,00	144.473.775,00	11,56	1.250.000.000,00	1.359.716.767,00	108,78	1.105.133.775,00	1.453.499.775,00	131,52

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Pendapatan

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan adalah analisis yang menggambarkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau dalam beberapa periode anggaran, kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Kinerja pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.2

Realisasi Pendapatan Kabupaten SBD Tahun 2014-2017

2014	2015	2016	2017
642.852.592.944	721.629.396.753	837.653.147.107,30	912.154.028.640,70

1) Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten SBD Anggaran 2015

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan thn } t - \text{Pendapatan thn } (t - 1)}{\text{Pendapatan thn } (t - 1)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan Tahun } t &= \frac{721.629.396.753 - 642.852.592.944}{642.852.592.944} \times 100\% \\ &= 12,25\%\end{aligned}$$

2) Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten SBD Anggaran 2016

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan thn } t - \text{Pendapatan thn } (t - 1)}{\text{Pendapatan thn } (t - 1)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Tahun } t &= \frac{837.653.147.107,30 - 721.629.396.753}{721.629.396.753} \times 100\% \\ &= 16,07\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan sebesar 16,07%, hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya baik dalam mengelola Pendapatan Daerah.

3) Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten SBD Anggaran 2017

$$\begin{aligned} \text{Analisis Pertumbuhan} &= \frac{\text{Pendapatan thn } t - \text{Pendapatan thn } (t - 1)}{\text{Pendapatan thn } (t - 1)} \times 100\% \\ \text{Pendapatan Tahun } t &= \frac{912.154.028.640,70 - 837.653.147.107,30}{837.653.147.107,30} \times 100\% \\ &= 8,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2017 sebesar 8,89%, hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya baik dalam mengelola Pendapatan Daerah.

Analisis Trend Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015-2017

Berikut ini adalah tabel Analisis Trend perhitungan Analisis pertumbuhan pendapatan tahun anggaran 2011-2016 dalam nominal maupun dalam persen.

Tabel 5.3

Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Tahun Anggaran 2015-2017 (Nominal)

Tahun Anggaran	Total Pendapatan Daerah (Rp)
2015	721.629.396.753,00

2016	837.653.147.107,30
2017	912.154.028.640,70

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa trend pertumbuhan pendapatan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 721.629.396.753,00 , tahun 2016 sebesar Rp. 837.653.147.107,30 , tahun 2017 sebesar Rp. 912.154.028.640,70.

Tabel 5.4

**Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan
Tahun Anggaran 2015-2017 (%)**

Tahun Anggaran	Total Pendapatan Daerah (%)
2015	12,25
2016	16,07
2017	8,89
Rata-rata	12,4

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas pertumbuhan pendapatan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami fluktuasi, dimana terjadi peningkatan persentase dari tahun 2015-2016 dan terjadi penurunan persentase pada tahun 2017. Walaupun terjadi fluktuasi pertumbuhan pendapatan, tetapi pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan positif.

2. Analisis Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan pelimpahan tanggung jawab atau kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan daerahnya. Derajat Desentralisasi ini juga akan menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berikut ini adalah perhitungan Analisis Derajat Desentralisasi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017.

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{70.221.696.103}{721.629.396.753} \times 100\% \\ &= 9,73\%\end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{65.929.271.186,60}{837.653.147.107,30} \times 100\% \\ &= 7,87\%\end{aligned}$$

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{169.451.573.444,20}{912.154.028.640,70} \times 100\% \\ &= 18,57\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan analisis derajat desentralisasi di atas, dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5
Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2015	70.221.696.103	721.629.396.753	9,73
2016	65.929.271.186,60	837.653.147.107,30	7,87
2017	169.451.573.444,20	912.154.028.640,70	18,57
Rata-rata Derajat Desentralisasi			12,05

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami peningkatan tiap tahunnya. Walaupun mengalami peningkatan persentase tiap tahunnya, namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih dikatakan rendah/sedang karena sesuai dengan standar pengukuran yang ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991) kategori persentase derajat desentralisasi 10,01% - 20,00% dikatakan kategori kurang. Kondisi ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kurang baik karena belum mampu memaksimalkan potensi yang dapat dijadikan Pendapatan Asli Daerah.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat.

Berikut ini adalah perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017 :

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan Keu. Daerah} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{677.293.650.266,00}{721.629.396.753,00} \times 100\% \\ &= 93,85\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan Keu. Daerah} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{792.782.821.383,00}{837.653.147.107,30} \times 100\% \\ &= 94,64\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan Keu. Daerah} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{792.782.821.383,00}{912.154.028.640,70} \times 100\% \\ &= 86,91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di atas, dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2015	677.293.650.266,00	721.629.396.753,00	93,85
2016	792.782.821.383,00	837.653.147.107,30	94,64
2017	792.782.821.383,00	912.154.028.640,70	86,91
Rata – rata Ketergantungan Keuangan Daerah			91,80

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas terlihat penurunan persentase tiap tahunnya dengan rata-rata persentase adalah 91,80%. Walaupun terjadi peningkatan dan penurunan namun ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih sangat tinggi karena masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat karena sesuai dengan standar pengukuran ketergantungan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991) yang menyatakan bahwa kategori ketergantungan keuangan daerah >50,00% dikategorikan sangat tinggi.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah ini akan menunjukkan seberapa besar dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah) yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar rasio ini berarti ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar semakin

berkurang seperti hibah, bantuan pemerintah pusat maupun provinsi. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Berikut ini adalah perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017.

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Keu. Daerah} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\% \\ &= \frac{44.191.272.752,00}{677.293.650.226,00} \times 100\% \\ &= 6,52\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Keu. Daerah} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\% \\ &= \frac{43.510.608.957,30}{792.782.821.383,00} \times 100\% \\ &= 5,48\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Keu. Daerah} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\% \\ &= \frac{95.920.806.099,60}{792.782.821.383,00} \times 100\% \\ &= 12,09\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di atas, dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.7

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	%
2015	44.191.272.752,00	677.293.650.226,00	6,52
2016	43.510.608.957,30	792.782.821.383,00	5,48
2017	95.920.806.099,60	792.782.821.383,00	12,09
Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah			8,03

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5.7 di atas terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami penurunan dan peningkatan persentase dengan rata-rata kemandirian keuangan daerahnya adalah 8,03%. Namun menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991), kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dikategorikan kurang karena sesuai dengan pengukurannya, yakni rentang persentase 10,01% - 20,00% dikategorikan kurang.

5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan target Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan). Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berikut ini adalah perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Transfer Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{44.335.746.507}{40.726.950.970} \times 100\% \\ &= 108,86\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Transfer Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{44.870.325.724,30}{43.565.217.104,31} \times 100\% \\ &= 102,99\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Transfer Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{97.374.305.874,60}{95.678.007.712,53} \times 100\% \\ &= 101,77\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di atas,
maka dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.8

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	%
2015	44.335.746.507	40.726.950.970	108,86
2016	44.870.325.724,30	43.565.217.104,31	102,99
2017	97.374.305.874,60	95.678.007.712,53	101,77
Rata-rata Efektivitas PAD			104,54

Sumber : Data diolah (2019)

Dari Tabel 5.8 di atas terlihat bahwa persentase Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami penurunan dengan rata-rata Efektivitas PAD adalah 104,54%. Namun dapat dilihat bahwa kinerja PAD Kabupaten Sumba Barat Daya sangat efektif karena skala intervalnya melebihi angka 100% sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991).

Analisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil yang efektif karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang ada lebih besar dari Anggaran Pendapatan yang direncanakan. Namun, sesungguhnya kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kurang baik karena total Pendapatan Asli Daerah yang ada dari tahun 2015-2017 masih lebih kecil dari Dana Transfer yang dalam hal ini dengan jelas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat.

Tabel 5.9
Gambaran Data Penelitian Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015			Tahun anggaran 2016			Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		Setelah			Setelah			Setelah		
		Perubahan			Perubahan			Perubahan		
	BELANJA	797.388.152.997,65	668.432.400.338,00	83,83	860.760.096.463,24	676.245.381.292,00	78,56	844.391.138.336,63	749.338.153.814,00	88,74
1	Belanja Operasi	553.802.202.872,00	465.170.959.415,00	84	598.044.043.866,00	507.075.100.796,00	84,79	575.290.345.264,65	518.637.060.483,00	90,15
2	Belanja Pegawai	249.443.840.702,00	220.882.598.750,00	88,55	267.607.889.035,00	239.625.112.322,00	89,54	228.755.743.765,65	220.328.055.520,00	96,32
3	Belanja Barang dan Jasa	299.021.362.170,00	242.121.360.665,00	80,97	319.944.154.831,00	259.572.988.474,00	81,13	318.583.601.499,00	270.558.004.963,00	84,93
4	Belanja Hibah	4.600.000.000,00	1.500.000.000,00	32,61	7.600.000.000,00	5.400.000.000,00	71,05	27.951.000.000,00	27.751.000.000,00	99,28
5	Belanja Bantuan Sosial	737.000.000,00	667.000.000,00	90,5	996.000.000,00	581.000.000,00	58,33			
6	Belanja Modal	242.305.653.303,04	203.166.140.923,00	83,85	260.345.866.413,00	169.170.280.496,00	64,98	268.543.187.586,98	230.701.093.331,00	85,91
7	Belanja Tak Terduga	1.280.296.822,61	95.300.000,00	7,44	2.370.186.184,24	0,00		557.605.485,00	0,00	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

5.2.2 Belanja

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja selalu memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Anggaran belanja tertentu bisa saja negative atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tidak diprioritas untuk tahun sekarang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini adalah perhitungan analisis pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2015-2017 :

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{\text{Analisis Belanja thn } t - \text{Realisasi Belanja thn } (t-1)}{\text{Pendapatan thn } (t-1)} \times 100\% \\ \text{Belanja Tahun } t &= \frac{668.432.400.338,00 - 492.340.038.662,27}{492.340.038.662,27} \times 100\% \\ &= 35,76\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{\text{Analisis Belanja thn } t - \text{Realisasi Belanja thn } (t-1)}{\text{Pendapatan thn } (t-1)} \times 100\% \\ \text{Belanja Tahun } t &= \frac{676.245.381.292,00 - 668.432.400.338,00}{668.432.400.338,00} \times 100\% \\ &= 1,16\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{\text{Analisis Belanja thn } t - \text{Realisasi Belanja thn } (t-1)}{\text{Pendapatan thn } (t-1)} \times 100\% \\ \text{Belanja Tahun } t &= \frac{749.338.153.814,00 - 676.245.381.292,00}{676.245.381.292,00} \times 100\% \\ &= 10,80\% \end{aligned}$$

Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun Anggaran 2015-2017

Tabel 5.10

Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017 (Nominal)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)
2015	668.432.400.338,00
2016	676.245.381.292,00
2017	749.338.153.814,00

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas terlihat bahwa pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 total belanja daerahnya adalah Rp 668.432.400.338,00, pada tahun 2016 adalah Rp 676.245.381.292,00, pada tahun 2017 adalah Rp. 749.338.153.814,00.

Tabel 5.11

Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017 (%)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (%)
2015	35,76
2016	1,16
2017	10,80
Rata-rata	15,90

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel 5.9 di atas terlihat bahwa kinerja belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilihat dari pertumbuhannya mengalami penurunan dimana terjadi penurunan persentase pada tahun 2016 dan naik di 2017. Walaupun terjadi penurunan tetapi pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tetap positif. Sehingga dapat dinilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dengan pengelolaan belanja daerah dikatakan baik karena mampu melakukan penghematan anggaran belanja.

2. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. angka yang dihasilkan oleh rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Berikut ini adalah perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015-2017 :

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efisien Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{668.432.400.338,00}{797.388.152.997,65} \times 100\% \\
 &= 83,82\%
 \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisien Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{676.245.381.292,00}{860.760.096.463,24} \times 100\% \\ &= 78,56\%\end{aligned}$$

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisien Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{749.338.153.814,00}{844.391.138.336,63} \times 100\% \\ &= 88,74\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio diatas, dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.12

Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
2015	797.388.152.997,65	668.432.400.338,00	83,82
2016	860.760.096.463,24	676.245.381.292,00	78,56
2017	844.391.138.336,63	749.338.153.814,00	88,74
Rata-rata Efisiensi Belanja			83,70

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 5.10 di atas terlihat bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tidak melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2015-

2017 semua persentase rasio efisiensi belanja menunjukkan angka dibawah 100% dengan rata-rata efisiensi belanja daerahnya adalah 83,70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penghematan dalam kegiatan belanja daerah untuk tiga tahun tersebut.